

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Setiap tahun jumlah penduduk di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Berdasarkan data badan pusat statistik (BPS), jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2021 dimana terdapat 374,77 ribu jiwa. Data di tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 85 persen, dengan pemeluk agama Islam berjumlah 86,7 persen. Dengan jumlah pemeluk agama Islam yang begitu banyak menjadikan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, dan pemeluk agama Islam ke 35 terbesar di dunia. Walaupun seperti itu Indonesia merupakan negara yang bukan negara Islam melainkan negara yang sangat pluralistik yang menganut asas Pancasila.¹

Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai aturan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya sebagai aturan dan tata cara dalam pemilihan kepala daerah. Peraturan pemilihan kepala daerah telah diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004 yang mengalami beberapa kali perubahan pada tahun 2008 yang menjadi pasal 58 UU nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia.²

Pemilihan kepala daerah yang berlangsung di DKI Jakarta mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Pasangan calon yang memenangkan kontestasi Pilkada ini mempunyai peluang yang cukup untuk maju dalam pemilihan presiden. Oleh sebab itu Pilkada DKI Jakarta menjadi ajang pembuktian seberapa banyak masa, partai pengusung, dan pendukung yang dapat menjadi modal bagi seleksi kepala negara.

Pencalonan kandidat kepala negara yang membutuhkan banyak dukungan secara moril dan materiil, menjadikan Pilkada sebagai batu locatan dan ajang pembuktian seberapa besar pengaruh, elektabilitas, dan kredibilitas seorang calon kepala negara. Oleh sebab itu atensi masyarakat terhadap pemilihan kepala negara tergolong tinggi tetapi

¹ Rudiana Rudiana, 'Islam Sebuah Sistem Kehidupan Negara', *CosmoGov*, volume1, Nomor 1 (2017), 188

² Fany Lestari, 'Isu Sara (Suku, Agama, Ras Antar Golongan Dalam Pemilu/Pilkada)', *KPU Kabupaten Bangka Barat*, 1 (2017), 154–70.

juga memicu perbedaan pilihan di tengah masyarakat menjadi sangat terasa.

Perbedaan pilihan di masing-masing calon menjadikan sering terjadi konflik antar kelompok yang erat dengan isu kelompok, suku, agama, ras, dan jenis kelamin dari calon kepala daerah. Konflik semacam ini sudah sering terjadi tetapi yang paling fenomenal dan mendapatkan perhatian banyak media serta masyarakat luas terjadi DKI tahun 2017 lalu.³

Kasus Basuki Tjahaja Purnama yang biasa disebut Ahok ini menjadi salah satunya yang menarik perhatian, sebagai gubernur DKI Jakarta saat itu Ahok memiliki banyak massa, partai pendukung, dan otoritas sebagai gubernur tetapi Ahok menggunakan potongan ayat surah Al-Maidah tersebut sebagai hal yang melegitimasi jabatannya. Hal itu menjadi awal panas nya persaingan politik, Khususnya setelah Ahok yang melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka kepulauan Seribu pada tanggal 30 september 2016.⁴

Berkembangnya kasus dugaan penistaan agama mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia, tidak hanya dari masyarakat yang akan melakukan Pilkada, tetapi juga masyarakat muslim Indonesia pada umumnya. Kontestasi yang dijalankan/dilaksanakan pada pilkada DKI Jakarta juga diwarnai dengan banyak isu. Mulai dari isu lingkungan, ekonomi, budaya, pemukiman, dan isu sara yang menambah keruh kontestasi yang harusnya berjalan secara demokratis. Hal itu menjadikan kontestasi penuh dengan *hatespeech* dan saling serang antar pendukung. Salah satu bentuk kekhawatiran yang lebih dikhawatirkan adalah terpecahnya persaudaraan umat Islam di Indonesia mengingat kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok menyedot perhatian sebagian besar umat Islam di Indonesia. Hal ini kemudian mendorong lahirnya politik identitas.

Politik identitas dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 sangat terasa dari aksi-aksi yang mengatasnamakan agama dan terkesan berafiliasi kepada calon tertentu. Tuduhan rasisme juga terjadi dan menjadi perhatian masyarakat saat itu. politik identitas yang dijalankan justru sangat berpotensi memecah belah bukan hanya saat Pilkada bahkan berlanjut ke kontestasi lainnya di antaranya pemilihan presiden. Hal itu memberi pemahaman bahwa politik identitas adalah gerakan politik yang ada di dalam setiap komunitas, walaupun

³ Heru Nugroho, 'Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia', volume1. Nomor1 (2012).

⁴ Sutrisno, 'Pilkada DKI JAKARTA 2017', *Journal Information*, volume 10.7 (2016), 1–16.

berideologi dan tujuan yang sama tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam individu yang memiliki kepribadian dan identitas masing-masing.⁵

Politik identitas dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta sangat terasa dampaknya. Mulai dari unjuk rasa yang menyinggung salah satu calon, keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) Islam, dan simbol-simbol agama yang marak digunakan pada dan setelah aksi unjuk rasa 411 dan 212. Pemakaian simbol-simbol agama yang terlalu mencolok menandakan bahwa masyarakat Indonesia secara keseluruhan, tidak hanya masyarakat yang ada di DKI Jakarta tersinggung atas kejadian dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok hal ini menjadikan Ahok kehilangan dukungan dan simpati dari kalangan masyarakat muslim walaupun tidak semuanya.⁶

Salah satu ormas Islam yang turut memprakarsai aksi unjuk rasa 411, 212, adalah FPI dan Habib Rizieq sebagai pemimpinnya mempunyai peran dalam kontestasi politik pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2017. *Track record* orang tua dan Habib Rizieq sendiri adalah pendiri organisasi menjadikan nama Habib Rizieq lebih mempunyai pengaruh dalam berkembangnya perpolitikan di DKI Jakarta. Habib Rizieq mempunyai legitimasi sebagai pemuka agama yang tinggi untuk menentukan jalan organisasinya dalam perkembangan zaman.⁷

Politik identitas muncul karena ada keyakinan bahwa langkah tersebut adalah cara mudah untuk mendulang simpati dan dukungan masyarakat secara "instan" di tengah kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 adanya.⁸ Hal ini mencirikan sebuah media baru terutama di dukung dengan internet. Istilah media baru telah digunakan sejak tahun 1960-an dan mencakup seperangkat teknologi komunikasi yang semakin berkembang pada zaman era globalisasi. Komputerisasi yang diterapkan pada komunikasi telah banyak melahirkan varian, sehingga tidak ada satupun yang dominan dalam bidang ini. Postmes menggambarkan bahwa komputerisasi sebagai teknologi komunikasi

⁵ Bagus Permadi, 'Kontestasi Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Studi Tentang Jejaring Mobilitas Politik Pencalonan Ahok Djarot', 2017, 1-16.

⁶ Lita Larassati, 'Kasus Pilkada DKI Jakarta Yang Mengalami Kemunduran Demokrasi Ditinjau Dari Legitimasi Dan Tujuan Negara Indonesia', *Journal of Materials Processing Technology*, volume 1. Nomor 1 (2018), 1-8.

⁷ Arie Setyaningrum Pamungkas dan Gita Octaviani, 'Aksi Bela Islam Dan Ruang Publik Muslim: Dari Representasi Daring Ke Komunitas Luring', volume 4. Nomor 2 (2017).

⁸ Yeni Sri Lestari, 'Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama', *Journal of Politics and Policy Volume 1, Number 1, Desember 2018 Politik*, 1.1 (2018), 19-30.

yang secara unik tidak berdedikasi, maksudnya adalah para user yang memiliki potensi yang berpengaruh di media tersebut bekerja dengan cara yang sedikit sulit untuk dipahami dan tidak ada pemimpin dalam media tersebut.⁹

Pemberitaan pada saat diselenggarakannya Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 memang mengundang banyak perhatian masyarakat Indonesia apalagi ditambah dengan unsur-unsur kampanye hitam atau biasa juga disebut dengan *black campaign* yang menyangkut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Termasuk pada pemberitaan yang dimuat dalam dua media *meinstrem* yang berpengaruh di Indonesia yaitu Kompas.com dan Republika.co.id.

Keterlibatan ormas-ormas besar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam merespon kasus penistaan agama, kedua ormas tersebut lebih memilih memberikan warna tersendiri bagi jalannya demokrasi di Indonesia khususnya pada jalannya kontestasi pilkada DKI Jakarta yang mendapatkan perhatian besar dari masyarakat khususnya umat islam.

Mengutip pernyataan Saiful Mujani merupakan “jantungnya demokrasi”. Keduanya menjadi pengawal jalannya demokratisasi di Indonesia sejak terbentuknya republik ini hingga pasca reformasi. NU dan Muhammadiyah telah mampu menempatkan kader-kadernya sebagai anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif. Melalui kader mereka itu, NU dan Muhammadiyah memainkan partisipasi politik yang besar dan lebih bermakna.¹⁰

Penyikapan kedua ormas melalui media masing-masing tentang Pilkada DKI Jakarta dan kasus dugaan penistaan agama yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Banyak yang menilai keduanya melakukan politik dua kaki, tetapi keduanya tetap dengan pendirian keputusan masing-masing dimana kedua ormas sepakat bahwa tidak menganjurkan tetapi juga tidak melarang para kader-kader untuk mengikuti jalannya aksi yang digelar pada 2 desember 2016 yang lalu.

Pada aksi di bulan Februari 2017 kedua ormas ini menyatakan bahwa tidak mendukung Aksi Bela Islam jilid II. Menurut pemimpin

⁹ Nanang Mizwar Hasyim, ‘Media Dan Konstruksi Identitas Kepemimpinan (Studi Konstruksi Identitas Kepemimpinan Ahok Oleh Media Online)’, *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, volume IX. Nomor 2 (2018), 256–82.

¹⁰ Rangga Kusumo and Hurriyah Hurriyah, ‘Populisme Islam Di Indonesia : Studi Kasus Aksi Bela Islam Oleh GNPf-MUI Populisme Islam Di Indonesia : Studi Kasus Aksi Bela Islam Oleh GNPf-MUI Tahun 2016-2017’, *HURRIYAH*, volume 1.October (2019) .

masing-masing ormas gerakan yang diadakan sudah tidak pada jalannya, tetapi gerakan ini sudah berbau politis. Berdasarkan ketua MUI saat itu yaitu Ma'ruf Amin menyatakan bahwa gerakan demo anti gubernur petahana tersebut menandakan afiliasi ke calon tertentu di Pilkada dan sudah tercampur kepentingan politik.¹¹

Keterlibatan ormas-ormas Islam dalam aksi unjuk rasa ini menambah mengkotakan masyarakat di akar rumput, FPI dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) yang memprakarsai dan menginisiasi gerakan ini sadar betul akan hal ini. Dalam aksi unjuk rasa tersebut GNPF-MUI menyatakan tuntutan untuk segera mengadili Ahok atas dugaan penistaan agama. GNPF-MUI juga mengeklaim bahwa pada aksi bela Islam yang terjadi di monumen nasional (Monas) membawa umat Islam sebanyak 3,2 juta yang berunjuk rasa. Mayoritas keputusan-keputusan GNPF-MUI dan FPI yang frontal dalam keagamaan Islam menjadikan suara yang berseberangan dengan dua ormas yang mendominasi di umat Indonesia yang terkesan lebih bijak dalam mengambil keputusan dalam ranah keagamaan¹². Simbol-simbol agama yang dibawa para pengunjuk rasa juga menunjukkan bahwa Politik identitas dalam aksi tersebut sangat kentara yang dampaknya dalam pilkada DKI Jakarta, dan simbol-simbol keagamaan ini menjadi bahan politisasi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah ini, mulai dari pakaian pengunjuk rasa, bendera yang dibawa sampai aksesoris yang dibawa oleh pengunjuk rasa. Aksi tersebut dianggap salah satu pihak ditumpangi oleh kepentingan politik yang memanfaatkan aksi dan umat Islam dalam unjuk rasa tersebut.¹³

Media baru yang banyak bermunculan saat kontestasi Pilkada DKI Jakarta berlangsung membuat banyak media menggecarkan pemberitaan-pemberitaan tentang isu-isu politik yang bertujuan untuk meningkatkan elektabilitas salah satu calon kepala daerah. Media *Online* dari yang bersifat *mainstream* hingga yang berada di *underground* mempunyai sudut pandang yang tersendiri dalam pemuatan pemberitaan mereka. Sudut pandang yang seperti ini biasa

¹¹ Abidatu Lintang Pradipta and others, 'Analisis Bingkai Pemberitaan Aksi Bela Islam 2 Desember 2016 (Aksi 212) Di Media Massa Bbc (Indonesia) & Republika', *Informasi*, volume 48.1 (2018), 109.

¹² Endang Sari, 'Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta Tahun 2017', *Journal of Politic and Government Studies*, volume 8.Nomor 04 (2019), 131–40.

¹³ 'Mengapa Bendera Hitam Bertuliskan Kalimat Tauhid Di Saudi "dianggap Musuh" Pemerintah? - BBC News Indonesia' <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46121835>> [accessed 17 February 2021].

kita kenal dengan istilah *framing*. *Framing* sendiri, merupakan pembingkaihan untuk sebuah berita untuk membentuk persepsi pembaca agar terbentuk karakter sesuai apa yang diinginkan pembuat berita. Terlebih lagi, maraknya media pemberitaan berbasis *Online* yang konteks pemuatan beritanya tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Pemberitaan mengenai kasus dugaan penistaan agama dari salah satu calon pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta dan melihat latar belakang yang ada, peneliti tertarik untuk meneliti tentang subjektifitas atau pembingkaihan (*framing*) pemberitaan tentang politik identitas dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 pada media *Online* Kompas.com dan Republika.co.id. Banyaknya pemberitaan yang ada saat berlangsungnya kontestasi Pilkada DKI Jakarta penulis akan membatasi penelitian ini dengan mengambil sub tema yaitu politik identitas yang akan diteliti hanya pemberitaan yang syarat dengan muatan keberpihakan atau subjektifitas dan ajakan sebagai seruan politik identitas dalam pemberitaan media *Online* Kompas.com dan Republika.co.id.

B. Fokus Penelitian

Kajian terhadap politik identitas dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 tidak hanya menarik perhatian masyarakat Jakarta tetapi juga masyarakat Indonesia. Sebab terjadi Politik identitas yang sangat berpengaruh dalam kontestasi pilkada pada tahun 2017 tersebut. Politik identitas ini dapat dilihat dari pengaruh para tokoh agama yang memimpin ormasnya masing-masing, elit politik dalam lingkup keagamaan, figur-figur elit politik, ormas-ormas yang terlibat, dan simbol-simbol keagamaan yang digunakan untuk mendukung salah satu pasangan calon. Oleh sebab itu, guna memudahkan penelitian peneliti. Akan meneliti dari dua media *Online*, yaitu Kompas.com dan Republika.co.id. keduanya memuat pemberitaan dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Peneliti akan memfokuskan penelitian kepada pemberitaan yang berisi subjektifitas dan bermuatan politik identitas yang dimuat di tengah kontestasi pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diperoleh rumusan masalah terkait dengan penulisan yang akan dilakukan oleh penulis yaitu :

1. Bagaimana politik identitas pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2017 berdasarkan pemberitaan media *Online* Kompas.com dan Republika.co.id ?
2. Bagaimana Independensi/subjektifitas atas pemberita anyang dimuat dalam pemberitaan media *Online* di Kompas.com dan Republika.co.id terhadap Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2017?

D. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui politik identitas pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2017 berdasarkan pemberitaan media *Online* Kompas.com dan Republika.co.id
2. Untuk mengetahui subjektifitas yang dilakukan Kompas.com dan Republika.co.id pada pemilihan ilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2017

E. Manfaat penelitian

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan gambaran terkait dengan politik identitas dalam pilkada DKI tahun 2017. Sebagaimana dengan adanya penulisan penelitian mengenai politik identitas ini mampu memberikan sebuah acuan guna mengetahui tentang politik identitas dalam pilkada DKI tahun 2017.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi pihak-pihak terkait atau pun bagi yang memiliki minat mengkaji tentang politik identitas dalam pilkada DKI tahun 2017 yaitu :

1. Segi teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan memberikan kontribusi wacana serta mengembangkan pemikiran politik Islam, khususnya mengenai khasanah ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang politik identitas dalam sebuah kontestasi politik di Indonesia. Adapun hasil penelitian ini juga dapat memperkaya kajian dalam ranah kontestasi di pemilihan kepala daerah Indonesia.

2. Segi praktis

Adapun penelitian ini memiliki kegunaan praktis sebagai berikut :

- a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam sebuah pertimbangan dalam penelitian khususnya dalam bidang politik identitas dalam kontestasi pemilihan kepala daerah DKI Jakarta dan hal ini sangat bermanfaat bagi peneliti,

instansi, maupun yang lainnya, dalam mengetahui terkait dengan persoalan politik identitas di Indonesia yang dalam konteks kenegaraan.

- b) Mampu memberikan gambaran yang lebih luas tentang kajian terkait Politik identitas dalam pilkada DKI tahun 2017.
- c) Sumber inspirasi, rujukan untuk lebih memahami makna politik identitas, dan penelitian mengenai Politik identitas dalam konteks pilkada DKI Jakarta tahun 2017 silam. Yang dalam konteksnya kental dengan politik identitas dan Politik identitas dalam konteks pemilu DKI Jakarta tahun 2017.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran sekaligus garis-garis dari bagian-bagian maupun yang saling berhubungan atau bersangkutan. Sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut ini ialah sistematika penulisan proposal skripsi yang akan penulis susun sebagaimana berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada awal bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan proposal skripsi.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi uraian konsep mengenai definisi yang berkaitan dengan judul penelitian, yang meliputi aspek Politik identitas Islam dalam pilkada DKI 2017.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang: Jenis-jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Setting Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini mempunyai isi tentang latar belakang dan pembahasan terkait dengan politik identitas dalam konteks pilkada DKI tahun 2017.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini terdiri dari simpulan, dan saran serta penutup.

